

# KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN BANGKA

Fabel Akbar Riyanto

NPP. 29.0459

*Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

*Fakultas Manajemen Pemerintahan*

Email: [farian.akbarriyanto@gmail.com](mailto:farian.akbarriyanto@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statment/Background (GAP):** Organizational performance is the totality of the work achieved by an organization, the achievement of organizational goals means that organizational performance can be seen from the level of the extent to which the organization can achieve goals based on predetermined goals. Organizational performance is something that has been achieved by the organization within a certain period of time, both related to and. The problem that arises is that there is not optimal handling in Bangka Regency

**Purpose:** The purpose of this study was to determine the performance of the BPBD of Bangka Regency in handling Covid-19. **Method:** This research approach is a qualitative approach with the research location in Bangka Regency. The types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection is through observations, interviews, and documentation. **Result:** After the data is obtained and grouped, then analyzed and linked with the theories described. **Conclusion/Sugegestion:** Based on the results of the research, the performance of the BPBD in Bangka Regency is considered to have not been carried out properly, this can be seen from the number of BPBD personnel that is not proportional to the area of operation, the limited budget in carrying out the handling, and the community who is aware of the importance of implementing health protocols has not been formed.

**Keywords:** *Performance; BPBD; Bangka Regency*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan maupun.

Permasalahan yang muncul yakni terjadi penanganan yang belum maksimal di Kabupaten Bangka. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja BPBD Kabupaten Bangka dalam penanganana Covid-19. **Metode:** Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bangka. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil **Kesimpulan dan Saran:** Berdasarkan hasil penelitian kinerja BPBD Kabupaten Bangka dinilai belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari jumlah personil BPBD yang tidak sebanding dengan wilayah operasi, Anggaran yang terbatas dalam melakukan penanganan , dan belum terbentuk masyarakat yang sadar pentingnya untuk menerapkan protokol kesehatan .  
**Kata Kunci:** Kinerja; BPBD; Kabupaten Bangka.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat, dan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (1). Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah pemerintah Indonesia mengarahkan kepada setiap daerah atau provinsi-provinsi di Indonesia untuk menerapkan otonomi, mengingat bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah. Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat (1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Disamping itu, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka munculah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka munculah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan

pemerintahan kepada perangkat pemerintahan daerah. Fungsi pemerintahan terbagi menjadi Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder. Fungsi primer meliputi Pelayanan dan Pengaturan, sedangkan Fungsi sekunder meliputi Pembangunan dan Pemberdayaan. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Jadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan di Kabupaten Bangka ialah termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Serta didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, eksternal serta harus berkepentingan nasional. Salah satu fungsi pemerintahan dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Bahwa dalam Keputusan Presiden tersebut dikatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Kemudian Penanganan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan 2020 ( covid-19 ) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan ( covid-19 ) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah, mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antaralain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pasal 4 tugas BPBD secara umum. Pendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan menyerahkan pengelolaan daerah-daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada setiap pemerintahan di Kota atau Kabupaten, Terkhusus di Kabupaten Bangka yang memiliki 8 kecamatan, merupakan kabupaten yang sangat berkembang terutama dalam pariwisata. Kabupaten Bangka atau dikenal dengan Bangka Induk adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka terletak di pulau Bangka dan memiliki luas wilayah sekitar 3.367,794 km<sup>2</sup> , Dengan 8 Kecamatan, 15 kelurahan, 62 desa definitif, 285 dusun, 0 lingkungan, dan 668 RT. Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka hasil survey penduduk di tahun 2020 sebesar 326.265 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 168.526 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 157.379 jiwa. (Kabupaten Bangka dalam angka 2021). Tercatat dari bulan maret 2020-Agustus 2020 jumlah kasus di Indonesia sudah mencapai angka 4.079.267 kasus, dengan angka kesembuhan mencapai 3.743.716, serta korban meninggal mencapai 132.491 jiwa, dan angka-angka ini selalu bertambah terus mengingat munculnya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang lebih menular. Selain itu minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M (Memakai masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga jarak).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil.**

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Bangka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka diberi kewenangan langsung oleh Bupati Bangka untuk melaksanakan tindakan penanganan Covid-19 di kabupaten Bangka kemudian juga diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , sehingga diharapkan mampu meredam penularan Covid-19 di Kabupaten Bangka. Namun berdasarkan fakta-fakta di lapangan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bangka masih belum memuaskan dikarenakan beberapa faktor. Sehingga Kasus Covid-19 di kabupaten Bangka masih dinilai terlalu tinggi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang pertama Hasil Penelitian

Penelitian Vunny Wijaya (2020), berjudul “Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dalam penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja gugus tugas percepatan penanganan dan mengetahui upaya apa sajakah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Menuju Kenormalan Baru. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan perlu memberi perhatian khusus terhadap beberapa aspek yakni, Kualitas pelayanan, daya tanggap dan tanggung jawab. Untuk meningkatkan kinerja dan menuju (kebiasaan baru), langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan aspek kualitas pelayanan, dalam hal ini keakuratan informasi yang diberikan. Kedua, dari sisi daya tanggap, pendataan terkait kebutuhan alat kesehatan dapat lebih tertata dengan jelas melalui penggunaan aplikasi online yang terintegrasi. Ketiga, dalam rangka akuntabilitas, perlu adanya transparansi dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, menjelaskan bahwa kinerja gugus tugas percepatan penanganan covid-19 memiliki hasil akhir yang berbeda dengan bidang yang diteliti. Dalam evaluasi kinerja diatas yaitu evaluasi kinerja gugus tugas covid-19 memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan persamaan pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti terkait kinerja penanganan covid-19. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada lokasi penelitiannya yaitu di, teori tingkat nasional, teori yang digunakan yaitu teori Levine et al. yang mengukur variabel keberhasilan implementasi kebijakan dengan tiga aspek yakni Kualitas pelayanan, daya tanggap dan tanggung jawab. Penelitian Yang kedua yaitu Penelitian Nurmala Harahap (2020), yang berjudul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru”. dalam penelitiannya menyimpulkan, Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dinilai masih belum baik,

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil peneliti. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bangka.

## **II. METODE**

Pada dasarnya, penelitian adalah proses menemukan sesuatu yang ingin diketahui. Untuk melakukan penelitian yang baik, peneliti tidak hanya harus mengetahui aturan-aturan, tetapi juga harus terampil dalam melakukan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah yang mendalam, diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan

kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Desain penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang benar, yaitu data yang konsisten dengan objek yang diteliti. Berdasarkan David H. Penny dalam Narbuko (2013:1) penelitian merupakan “Pemikiran yang terpadu terkait bermacam permasalahan yang pemecahannya membutuhkan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”. Mohammad Ali dalam Narbuko (2013:2) menyatakan bahwa penelitian merupakan “Teknik untuk memahami sesuatu dengan cara menyelidiki atau menemukan bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut, yang dilakukan dengan hati-hati sehingga dapat diperoleh pemecahannya”. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian merupakan seluruh metode atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berawal dari merumuskan masalah hingga menarik suatu kesimpulan. Terdapat dua jenis pendekatan dalam suatu penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang data dan informasinya disuguhkan dalam bentuk pernyataan. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang informasi dan datanya disuguhkan dalam bentuk angka. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif sebab penelitian ini fokus pada menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar benar terjadi, agar dapat memahami setiap fakta yang terjadi dilapangan dan dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode ini yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka mengenai Penanganan Covid-19.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangka**

Secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yakni kinerja pegawai secara perorangan dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Armstrong dan Baron (1998 : 15), mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedarmayanti dalam bukunya memaparkan bahwa kinerja merupakan pencapaian setiap individu atau sekelompok individu dalam organisasi. Untuk memperoleh pencapaian tersebut, setiap individu atau kelompok menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan organisasi yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan benar. Kinerja adalah sebuah pencapaian atau hasil yang kita kerjakan. Jika kinerja yang kita lakukan dengan baik, maka hasil dan pencapaian yang didapatkan juga pasti akan baik. Selain itu, kinerja juga sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu organisasi baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Menurut Wibowo (2016 : 89), kinerja organisasional merupakan produk dari banyak faktor termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan

manusia, posisi strategis, dan sumber daya manusia. Menurut Wibowo (2016 : 86) Indikator Kinerja digunakan untuk kegiatan yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan) daripada retrospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan jalan pada aspek kinerja yang perlu diobservasi. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dikutip dari Pasolong (2013 : 77) menyatakan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran ( outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits ), dan dampak ( impacts). Mahsun (2016 : 31), Indikator kinerja suatu organisasi disebutkan sebagai berikut :

- I. Dimensi masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.
- II. Dimensi proses yang berarti organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.
- III. Dimensi keluaran (Output) adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- IV. Dimensi hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancau dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi

akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

V. Dimensi manfaat (benefit) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). Berdasarkan pengertian diatas maka indikator dari dimensi tersebut ialah pendapatan asli daerah yang meningkat karena sesuai dengan dimensi hasil yang telah dihasilkan pada indikator hasil.

VI. Dimensi dampak (impact) yang berarti pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Kinerja yang dimaksud dalam hal ini ialah bagaiman kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani pandemi yang terjadi di Kabupaten Bangka, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka adalah salah satu Instansi Pemerintah kabupaten Bangka yang menangani permasalahan bencana banjir yang terjadi di kabupaten Bangka. Untuk melihat Pelaksanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanganan di Kabupaten Bangka, maka peneliti uraikan hasil wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut:

### **1. Masukan (Input)**

Secara umum yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan di proses di dalam suatu kegiatan. Input adalah semua potensi yang dimasukkan sebagai modal awal kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Mahsun (20016 : 31) masukan (input ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti sumber daya manusia, peralatan dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan masukan (input) dalam penelitian ini yakni terjadinya kecukupan sumberdaya yang ada. Untuk mengukur input dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator, yaitu :

#### **a. Jumlah dana yang diperlukan**

Jumlah dana yang diperlukan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang apakah dana BPBD Kabupaten Bangka sudah mencukupi dalam melakukan penanganan di Kabupaten Bangka. BPBD Kabupaten Bangka hanya memiliki anggaran yang terbatas pada tahun 2021 dikarenakan anggaran untuk penanganan terbagi kepada instansi-instansi terkait. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat dikarenakan anggaran yang terbatas.

**b. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan**

Jumlah pegawai yang dibutuhkan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang apakah personil dari BPBD Kabupaten Bangka sudah mencukupi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangka. BPBD Kabupaten Bangka hanya memiliki pegawai atau personil sebanyak 42 orang dan itupun dibagi menjadi 2 kelompok, hal ini jauh dari kata cukup karena dengan 42 orang personil tidak akan mampu melakukan penanganan secara efektif dan efisien dikarenakan luas wilayah Kabupaten Bangka yang sangat luas, maka personil BPBD Kabupaten Bangka akan sangat kesulitan dalam penanganan yang ada di Kabupaten Bangka. Dari hasil penelitian diatas tentang indikator masukan (input) berkaitan dengan jumlah pegawai atau personil BPBD Kabupaten Bangka dalam penanganan covid-19 yang ada di Kabupaten Bangka dapat diketahui bahwa jumlah personil yang ada di BPBD Kabupaten Bangka masih sedikit dan belum bias mengcover titik-titik covid-19 yang ada di Kabupaten Bangka. Sedangkan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, personil BPBD Kabupaten Bangka tidak sampai 42 orang yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Bangka karena BPBD Kabupaten Bangka membagi personil yang ada menjadi dua kelompok, yakni administrasi dan TRC (Tim Reaksi Cepat).

**c. Jumlah Fasilitas yang dibutuhkan**

jumlah fasilitas yang dibutuhkan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang tersedianya sarana dan prasarana kerja BPBD Kabupaten Bangka dalam penanganan BPBD Kabupaten Bangka masih kekurangan sarana dan prasarana kerja dalam penanganan mereka hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga hasil dari kinerja BPBD belum maksimal dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini menjadi kendala terlaksananya kinerja BPBD Kabupaten Bangka dengan baik. Dalam penanganan yang ada di Kabupaten Bangka BPBD Kabupaten Bangka masih kesulitan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Bangka, ini akan berpengaruh kepada hasil dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka khususnya dalam penanganan di Kabupaten Bangka. Sedangkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, peneliti menemukan ada beberapa sarana dan prasarana kerja BPBD Kabupaten Bangka tetapi masih sangat kurang, sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Bangka ada juga yang merupakan pinjaman dari BLH dan BPBD Provinsi. Sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Bangka salah satunya kendaraan roda dua hanya ada satu unit dan roda empat yang hanya ada tiga unit ini masih sangat minim sementara daerah yang terdampak sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja BPBD Kabupaten Bangka dalam penanganan covid-19.

**2. Proses (process)**

Secara umum output diartikan sebagai gambaran mengenai langkahlangkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan menurut Mahsun

(2016 : 31) menyatakan dalam indikator proses ini organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk melihat proses atau capaian dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator, yaitu :

**a. Kecepatan Pelaksanaan Kegiatan**

Kecepatan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah seberapa cepat pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka dalam merespon kasus yang terjadi di suatu titik itu cepat atau lambat. BPBD Kabupaten Bangka masih terkendala dalam mobilisasi personil ke tempat kejadian dikarenakan luas wilayah Kabupaten Bangka yang sangat luas. Sehingga menyulitkan personil BPBD Kabupaten Bangka untuk sampai di tempat kejadian tepat waktu. BPBD Kabupaten Bangka sudah memiliki SOP (standard Operation Procedure) dalam merespon laporan dari masyarakat terkait kasus covid-19 dalam waktu 25 menit. Sehingga diharapkan mampu menangani laporan kasus covid-19 secara cepat. Berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan, bahwa BPBD Kabupaten Bangka dalam hal merespon laporan dari masyarakat sudah sangat baik. Namun terdapat kendala dalam jarak ke tempat lokasi yang jauh. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bangka sudah sangat baik dalam hal kecepatan pelaksanaan kegiatan.

**b. Ketepatan pelaksanaan**

Ketepatan Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa tepat kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka. Karena keterbatasan anggaran maka kegiatan penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka harus tepat sasaran. Apabila kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran berarti kinerja BPBD Kabupaten Bangka sudah baik dalam penanganan tetapi jika kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bangka tidak tepat sasaran secara otomatis kinerja BPBD belum cukup baik dalam menangani covid-19. Salah satu kegiatan BPBD Kabupaten Bangka dalam menangani covid-19 berupa pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya virus covid-19 itu sendiri, sehingga perlu adanya pengawasan terhadap warga yang terjangkit virus covid-19. BPBD Kabupaten Bangka meyakini bahwa mereka mampu melaksanakan kegiatan selalu tepat sasaran sehingga dana yang terpakai untuk penanganan covid-19 dapat dioptimalkan. Apabila semua program kerja sudah terlaksana dengan baik secara otomatis kasus covid-19 akan semakin mudah dikendalikan. Sedangkan fakta yang peneliti temukan di lapangan untuk ketepatan pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kekurangan, contoh masih adanya masyarakat yang membandel untuk tidak melakukan isolasi karena terjangkit virus covid-19 akibat masih kurangnya pengawasan dari BPBD itu sendiri, sehingga peneliti menilai bahwa BPBD Kabupaten Bangka masih kurang tepat dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan covid-19 di Kabupaten Bangka.

### **c. Tingkat Akurasi Kegiatan**

Tingkat akurasi kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pendataan apakah sudah sesuai atau belum. Mengingat masih banyaknya kegiatan yang beresiko tidak tepat sasaran sehingga perlu pendataan dari BPBD itu sendiri. BPBD Kabupaten Bangka sudah memiliki data yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mengenai angka covid-19 sehingga tidak akan terjadi data yang salah.

## **3. Keluaran (output)**

Secara umum output diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Output adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Mahsun (2016 :31). Output juga mengandung arti sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Sedangkan NEA (2000) mengartikan output yaitu hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan menggunakan takaran volume/banyaknya. Yang dimaksud dengan output dalam penelitian ini yaitu hasil dari kinerja BPBD dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Bangka. Untuk melihat hasil dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator output, yaitu :

### **a. Sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan**

Sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan yang dimaksud dalam maksud penelitian ini adalah program kerja BPBD Kabupaten Bangka dalam menangani covid-19 Dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Bangka BPBD Kabupaten Bangka yaitu dengan sosialisasi protokol kesehatan covid-19 di tempat-tempat umum, seperti restaurant, café, dan lain-lain dengan sasaran masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan covid-19 sehingga membantu BPBD Kabupaten Bangka dalam melakukan penanganan covid-19 di kabupaten bangka. BPBD Kabupaten Bangka sudah aktif dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan terhadap masyarakat sehingga kegiatan tersebut sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Sedangkan hasil observasi peneliti menemukan masih banyaknya masyarakat yang membandel atau tidak mengindahkan himbauan dari BPBD Kabupaten Bangka untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga sosialisasi yang dilakukan terbatas oleh waktu. Sehingga peneliti menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka sudah cukup baik, ini dilihat dari usaha-usaha yang sudah dilakukan penanganan covid-19.

### **b. Pelaksanaan Regulasi**

Pelaksanaan regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan regulasi atau aturan yang berkaitan dengan penanganan covid-19, seperti penerapan 3 M (Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker), penerapan batas operasional tempat umum, dan pencegahan kerumunan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka. Kesadaran masyarakat terhadap

regulasi atau aturan mengenai covid-19 masih sangat rendah sehingga menyulitkan BPBD dalam melaksanakan penanganan covid-19 di Kabupaten Bangka, hal ini sangat disayangkan karena seharusnya untuk penanganan covid-19 tidak terlepas dari masyarakat Kabupaten Bangka Sendiri. Jika masyarakat kurang peduli terhadap aturan yang berlaku bagaimana BPBD mampu menangani covid-19 yang ada di Kabupaten Bangka. Sementara itu hasil dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa belum ada kesadaran dari masyarakat terhadap regulasi mengenai covid-19, buktinya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum sehingga ini akan menyebabkan pertumbuhan kasus covid-19 tetap tinggi

#### **4. Hasil (outcome)**

Outcome adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Menurut Mahsun (2016 : 31). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Outcome yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Bangka dalam penanganan covid-19 yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka. Untuk melihat manfaat dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator, yaitu :

##### **a. Penurunan Kasus Covid-19**

Kinerja BPBD Kabupaten Bangka bisa juga dilihat dari bagaimana pihak BPBD Kabupaten Bangka berusaha menurunkan kasus covid-19 yang ada di Kabupaten Bangka. Hal ini dilakukan dengan menjalankan program-program seperti sosialisasi protokol kesehatan, penerapan aturan mengenai, dan lain-lain. Hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan kasus yaitu vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pembatasan perjalanan.

##### **b. Tingkat Kepatuhan**

Ini merupakan sebuah nilai apakah BPBD Kabupaten Bangka mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terkait yang ada di Kabupaten Bangka. Kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan diawasi, karena apabila masyarakat sudah sadar atau patuh untuk menerapkan protokol kesehatan maka masyarakat tidak akan mudah terkena virus paling tidak mengurangi penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bangka. BPBD Kabupaten Bangka sangat mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bangka peduli terhadap Protokol Kesehatan sehingga penanganan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bangka tidak sia-sia. Apabila masyarakat peduli dengan protokol kesehatan maka angka kasus tidak akan mudah bertambah. Sedangkan hasil

observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Masyarakat di Kabupaten Bangka masih rendah dalam melaksanakan peraturan terkait penanganan covid-19 di kabupaten Bangka.

#### **5. Manfaat (benefit)**

Benefit adalah bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang berguna untuk memperlancar proses kerja. Secara umum, arti adalah suatu manfaat, kebaikan, guna atau faedah, kepentingan, laba atau untung, yang diperoleh oleh pihak yang berhak dari pihak lain atau dari suatu hal. Sedangkan menurut Mahsun (2016:31) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Benefit yang dimaksud dalam penelitian yaitu produk yang bisa dihasilkan dari kinerja BPBD Kabupaten Bangka dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari target yang dicapai dalam penanganan Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari capaian-capaian BPBD Kabupaten Bangka dalam menangani covid-19 di Kabupaten Bangka. Dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Bangka selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kinerja BPBD Kabupaten Bangka dalam melakukan penanganan di Kabupaten Bangka. Sehingga BPBD Kabupaten Bangka bisa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar target-target lain yang telah ditetapkan bisa tercapai. Sementara itu dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa hampir semua target-target yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bangka sudah tercapai, mulai dari penurunan level PPKM hingga capaian vaksinasi sudah sesuai target. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bangka sudah baik dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada target-target yang belum dicapai.

#### **6. Dampak (impact)**

Dampak atau adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian setiap indikator dalam suatu kegiatan. Pada umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Secara sederhana dapat dikatakan dampak adalah hasil dalam jangka Panjang dan lebih luas efeknya. Sedangkan menurut Mahsun (2016:31) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. yang dimaksud dalam penelitian yaitu dampak dari penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari dampak penanganan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka. BPBD Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan penanganan covid-19 sangat memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Bangka. Dalam hal ini masyarakat yang terdampak

pandemic covid-19 dan dampak terhadap pemerintahan di Kabupaten Bangka. BPBD Kabupaten Bangka mampu memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat yang terdampak sehingga kegiatan masyarakat sehari-hari dan juga roda pemerintahan tetap berjalan walaupun ada pembatasan. Sedangkan, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, BPBD Kabupaten Bangka mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pemerintahan Kabupaten Bangka. Sehingga hal ini harus dipertahankan agar kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tetap dinilai baik oleh masyarakat dan pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bangka sudah cukup memberikan dampak yang baik dalam menangani di Kabupaten Bangka.

### **3.2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Covid-19**

Dalam melakukan penanganan , tentu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka. Hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat proses berjalannya suatu program atau kegiatan. Penanganan merupakan bentuk pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bangka . Selain itu, dengan adanya penanganan oleh BPBD Kabupaten Bangka juga dijadikan sebagai sarana kajian guna menghadapi kondisi yang sama di masa mendatang oleh BPBD Kabupaten Bangka. Berikut faktor-faktor yang menghambat Penanganan di Kabupaten Bangka :

#### **1. Anggaran yang terbatas dalam penanganan Covid-19**

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga apabila anggaran untuk melaksanakan kegiatan terbatas, maka kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Maka diperlukan anggaran yang cukup agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Untuk BPBD Kabupaten Bangka sendiri, anggaran untuk penanganan Covid-19 itu sendiri dibatasi dikarenakan terbagi.

#### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan penanganan tidak terlepas dari beberapa hambatan salah satunya kurangnya sumber daya manusia atau personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka yang memadai untuk melakukan penanganan di Kabupaten Bangka mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bangka.

#### **3. Masih kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan penanganan . Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan penyumbang utama bertambahnya angka kasus covid-19. Sehingga apabila masyarakat belum ada

kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan maka usaha yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka akan sia-sia dalam rangka penanganan Covid-19.

### **3.3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam penanganan Covid-19.**

Setiap hambatan pasti memiliki solusi dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap sejumlah informan, adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi anggaran yang terbatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka melakukan penghematan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang penting saja. Selain itu Mengajukan penambahan anggaran terkait penanganan covidagar penanganan di Kabupaten Bangka berjalan dengan baik.
2. Untuk mengatasi Kurangnya Sumber Daya Manusia terkait kuantitas personil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka akan mengajukan permohonan kepada Pemerintahan Kabupaten Bangka untuk penambahan personil yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia juga dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para pegawai dan atau mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait dengan penanganan bencana terutama penanganan untuk meningkatkan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Bangka.
3. Untuk mengatasi permasalahan tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka akan gencar meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu pembentukan posko kecamatan dan desa akan diaktifkan kembali guna mempermudah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanganan di Kabupaten Bangka.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

BPBD Kabupaten Bangka mampu memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat yang terdampak sehingga kegiatan masyarakat sehari-hari dan juga roda pemerintahan tetap berjalan walaupun ada pembatasan, Sedangkan, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, BPBD Kabupaten Bangka mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pemerintahan Kabupaten Bangka. Sehingga hal ini harus dipertahankan agar kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tetap dinilai baik oleh masyarakat dan pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bangka sudah cukup memberikan dampak yang baik dalam menangani di Kabupaten Bangka.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan selama penelitian di lapangan mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan di Kabupaten Bangka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan di Kabupaten Bangka maka dapat diketahui bahwa hampir setiap indikator dijalankan dengan cukup baik. Namun dalam indikator sumber daya belum berjalan secara optimal. Hal ini karena sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka sangat terbatas dalam melaksanakan penanganan di Kabupaten Bangka. Sehingga dapat dikatakan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dalam menangani sudah cukup baik.
2. Faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan di Kabupaten Bangka adalah Banyak masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan di Kabupaten Bangka adalah meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar kasus dapat dikendalikan sehingga pertumbuhan kasus 19 tidak melonjak dengan pesat.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bangka.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Hubungan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bangka.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencaa Daerah Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Hamdi, Muchlis., Ismaryati, Siti. 2014. Metodologi Penelitian Administrasi, Edisi kedua, Banten: Universitas Terbuka
- Kothari, C.R. 2004. Research Methodology: Methods and

Technique(second revised edition), New Delhi: New Age International Publisher  
Mahsun. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPF Moelong, J.  
Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya  
Mulyadi, Mohammad, 2014. Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan  
Kualitatif. Jakarta: Publica Institute Nasution, 2003. Metode Penelitian  
Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito Nawawi, Ismail. 2013. Budaya Organisasi  
Kepemimpinan

#### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang  
Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan  
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

